

Peran Pemerintah Daerah dalam Mempromosikan Pariwisata di Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una

Indah Amelia I. Lanti ^{1,*}; Nurhannis ²; Syamsul Bahri ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; indahamelialanti@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; nurhannis1964@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sy2msul@gmail.com

*Correspondence : indahamelialanti@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Pemerintah Daerah, Promosi Pariwisata, Tojo Una-Una*

Received. : Mei 2026

Revised. : Juni 2026

Accepted : Juni 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata di Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai salah satu kawasan wisata bahari di Kepulauan Togean, serta mengevaluasi efektivitas strategi promosi terhadap peningkatan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Una-Una dan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung pada tahun 2025. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Pariwisata, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pelaku usaha wisata, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisor sebagaimana dikemukakan oleh (Siagian, 2003), namun implementasinya belum optimal. Peran regulator masih terkendala oleh belum tersedianya regulasi teknis terkait pengelolaan destinasi wisata, standar pelayanan, dan pedoman operasional. Peran fasilitator juga belum maksimal karena keterbatasan pelatihan, pendampingan teknis, dan pemerataan program peningkatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, fungsi dinamisor terlihat melalui penyelenggaraan kegiatan promosi seperti *Jelajah Togean*, meskipun dampaknya terhadap peningkatan kapasitas lokal masih terbatas. Penelitian ini berkontribusi dalam penguatan tata kelola pariwisata daerah melalui pentingnya penyusunan regulasi teknis, pemerataan fasilitasi, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan promosi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT:

This study aims to analyze the role of local government in promoting tourism in Una-Una District, Tojo Una-Una Regency, as one of the marine tourism areas in the Togean Islands, and to evaluate the effectiveness of tourism promotion strategies in increasing tourist attraction and improving the welfare of local communities. This study employed a descriptive qualitative approach conducted in Una-Una District during the 2025 research period. The informants consisted of representatives from the Tourism Office, district government, village government, tourism business actors, and community leaders. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation.

The results showed that the local government has carried out its functions as a regulator, facilitator, and dynamizer as proposed by Siagian (2003), although the implementation has not been optimal. The regulatory role is still constrained by the absence of technical regulations regarding destination management, service standards, and operational guidelines. The facilitator role is also limited due to the lack of training, technical assistance, and equal distribution of community capacity-building programs. Meanwhile, the dynamizer role is reflected in promotional events such as Jelajah Togeana, although its impact on improving local capacity remains limited. This study contributes to strengthening regional tourism governance by emphasizing the importance of technical regulations, equitable facilitation, and stronger collaboration among stakeholders to achieve inclusive and sustainable tourism promotion.

Pendahuluan

Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional Indonesia karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas budaya masyarakat lokal. Konsep (Dangi and Jamal, 2016) menekankan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat lokal. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan promosi sektor pariwisata di daerah.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penerapan prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan (Siskawati *et al.*, 2020). Kolaborasi menjadi kata kunci dalam membangun hubungan antar aktor dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (Maturbongs, 2020). Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut (Simamora and Sinaga, 2016), Keberhasilan pembangunan pariwisata sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya wisata melalui perencanaan, pengorganisasian, serta pengembangan destinasi secara berkelanjutan. Selain itu, (Nurdin, 2016) menjelaskan bahwa Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan pariwisata.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari adalah Kecamatan Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kecamatan ini merupakan salah satu pusat aktivitas wisata di Kepulauan Togeana yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut, panorama alam pesisir,

serta budaya masyarakat lokal yang unik. Potensi tersebut menjadikan Kecamatan Una-Una sebagai wilayah strategis dalam pengembangan wisata berbasis kelautan dan ekowisata di Indonesia. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai instrumen pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan berbagai intervensi kebijakan dan program pembangunan. Pengembangan industri pariwisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan aksesibilitas transportasi karena kualitas sarana dan prasarana transportasi sangat menentukan tingkat kunjungan wisatawan (Fadilla and Darmawan, 2018). Selain itu, program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pengelolaan destinasi wisata berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sutarto *et al.*, 2018). Pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan promosi digital berbasis partisipasi masyarakat. Strategi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kecamatan Una-Una masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan pariwisata, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, serta belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas wisata yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut (Putri and Hardjanto, 2016), Pengembangan pariwisata di wilayah kepulauan menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya konektivitas antarwilayah, serta aksesibilitas yang belum memadai. Selain itu, (Khotimah, 2017) menjelaskan bahwa aktivitas pariwisata yang tidak disertai pengawasan lingkungan yang efektif berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas destinasi wisata dalam jangka panjang.. Peningkatan aktivitas wisata di Kecamatan Una-Una belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara mandiri, dan belum meratanya manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah daerah dengan implementasi kebijakan di lapangan. (Díaz and Rodríguez, 2016) menyatakan bahwa konsep *sustainable tourism development* menekankan integrasi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Penelitian mengenai pengembangan pariwisata dan peran pemerintah daerah telah banyak dilakukan sebelumnya. (Matthoriq, Zauhar and Hermawan, 2021) menekankan bahwa promosi pariwisata membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik

destinasi wisata. Penelitian lainnya oleh (Aswita and Andalia, 2017) menjelaskan bahwa pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata sehingga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas strategi pemerintah daerah dalam promosi pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Una-Una masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada analisis strategi pemerintah daerah, tantangan tata kelola pemerintahan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan di wilayah kepulauan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam mempromosikan dan mengelola pariwisata secara berkelanjutan di Kecamatan Una-Una. Hal tersebut terlihat dari belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal, serta masih adanya dampak lingkungan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. Selain itu, meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dan program pengembangan pariwisata, manfaat yang dirasakan masyarakat lokal masih belum maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata di Kecamatan Una-Una, mengidentifikasi tantangan tata kelola pariwisata berkelanjutan, serta mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan pariwisata terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini penting karena sektor pariwisata memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah, khususnya wilayah kepulauan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan terkait tata kelola pariwisata daerah, sedangkan secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pariwisata yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata di Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif pandangan, pengalaman, serta keterlibatan berbagai pihak dalam upaya promosi pariwisata di wilayah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang telah ditentukan, yaitu aparat pemerintah daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una), pemerintah desa setempat di Kecamatan Una-Una, pelaku usaha

pariwisata seperti pemilik *homestay*, pemandu wisata, dan pelaku usaha terkait lainnya, serta tokoh masyarakat dan warga lokal. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai peran pemerintah daerah dalam promosi pariwisata, bentuk strategi yang dilakukan, tingkat keterlibatan masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Una-Una.

Selain wawancara, observasi dilakukan secara langsung di Kecamatan Una-Una untuk melihat kondisi objektif di lapangan, termasuk potensi wisata yang ada, aktivitas promosi yang dilakukan, serta keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan pariwisata. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan dan strategi promosi pariwisata oleh pemerintah daerah.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data sekunder meliputi dokumen resmi pemerintah daerah, laporan Dinas Pariwisata, data desa, arsip kegiatan promosi wisata, publikasi terkait pariwisata daerah, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat dan melengkapi data primer.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian penyajian data, dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami serta penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data yang telah dianalisis.

Hasil

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan pariwisata di Kecamatan Una-Una belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya regulasi teknis yang rinci sebagai pedoman operasional di tingkat desa maupun pelaku usaha.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Pariwisata Kecamatan Una-Una, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum diturunkan ke dalam pedoman teknis operasional. Beliau menyatakan bahwa *“Aturan tentang pariwisata sebenarnya ada, tetapi masih bersifat umum. Kami belum punya pedoman teknis yang rinci untuk setiap desa, termasuk soal pengelolaan destinasi, tarif, dan standar operasionalnya.”*

Ketua Pokdarwis menjelaskan bahwa ketiadaan regulasi menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan destinasi wisata. Ia menyampaikan bahwa *“Kami ini sebenarnya butuh aturan tertulis. Aturan tentang bagaimana mengelola destinasi, aturan pungutan, siapa yang bertanggung jawab apa. Tapi sampai sekarang belum ada.”* Selain itu, ia juga menambahkan bahwa *“Kalau ada pungutan atau pengelolaan fasilitas, kami harus berhati-hati karena belum ada dasar hukum yang jelas.”*

Pengelola *homestay* menyatakan bahwa belum terdapat standar baku dari pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa *“Untuk homestay belum ada aturan baku dari pemerintah. Kami tidak punya standar tertulis tentang tarif, pelayanan, atau fasilitas minimal.”* Kondisi ini menyebabkan perbedaan kualitas layanan antar *homestay* karena tidak adanya acuan standar.

Kepala Desa Tanimpo juga menegaskan bahwa pengelolaan wisata masih terbatas karena belum adanya pedoman resmi. Ia menyatakan bahwa *“Sebenarnya kami ingin buat Peraturan Desa untuk Air Terjun Tanimpo ini, tapi kami menunggu arahan dari pemerintah kabupaten.”* Beliau juga menambahkan bahwa *“Selama belum ada, kami pakai kesepakatan internal saja.”*

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pemerintah sebagai regulator belum optimal. Dalam teori tata kelola pariwisata, pemerintah seharusnya menyediakan kerangka regulasi yang jelas sebagai acuan pengelolaan destinasi wisata. Namun, di Kecamatan Una-Una, regulasi yang tersedia masih berada pada level umum dan belum menjawab kebutuhan operasional di lapangan. Akibatnya, pengelolaan wisata menjadi tidak seragam, tidak memiliki kepastian hukum, serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran antar pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi teknis agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan.

2. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Una-Una belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditandai dengan terbatasnya pelaksanaan pelatihan, pendampingan, serta belum meratanya program peningkatan kapasitas masyarakat di sektor pariwisata.

Wawancara dengan Kepala Kantor Pariwisata Kecamatan Una-Una mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program fasilitasi secara berkelanjutan. Informan menyatakan *“Kami sebenarnya ingin memberikan pelatihan secara rutin, tapi anggaran untuk kegiatan pengembangan SDM itu terbatas.”* Pernyataan lain menunjukkan bahwa pemerataan pendampingan belum tercapai karena keterbatasan tenaga lapangan dan kondisi geografis, yaitu *“Ada desa yang sudah kami dampingi beberapa kali, tapi ada juga yang belum tersentuh.”*

Wawancara dengan Ketua Pokdarwis menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitasi teknis masih terbatas. Informan menyatakan *“Pelatihan dari pemerintah itu jarang sekali, bahkan beberapa tahun terakhir hampir tidak ada.”* Pemerintah telah melaksanakan kegiatan promosi seperti *event* dan festival pariwisata, namun upaya tersebut belum disertai dengan pembinaan teknis yang memadai untuk meningkatkan kapasitas pengelola destinasi. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara fungsi promosi dan fungsi fasilitasi.

Wawancara dengan pengelola *homestay* menunjukkan bahwa pelaku usaha

belum memperoleh pelatihan terkait pengelolaan akomodasi wisata. Informan menyatakan *"Kami belum pernah dapat pelatihan tentang cara mengelola homestay atau melayani wisatawan."* Pengelolaan *homestay* dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi tanpa standar pelayanan yang jelas sehingga kualitas layanan belum seragam antar pelaku usaha. Wawancara dengan Kepala Desa Tanimpo menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Air Terjun Tanimpo masih dilakukan secara swadaya tanpa pendampingan teknis yang memadai. Informan menyatakan *"Sampai sekarang belum ada pelatihan dari pemerintah, baik tentang manajemen wisata, keamanan destinasi, maupun cara mempromosikan tempat wisata."*

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam bentuk kegiatan promosi seperti *event* dan festival pariwisata telah dilakukan. Fungsi tersebut belum diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan pelaku wisata, Pokdarwis, dan pemerintah desa masih mengandalkan kemampuan mandiri dalam mengelola destinasi.

Konsep *Community-Based Tourism (CBT)* menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pemerataan fasilitasi, penguatan sumber daya manusia, dan pendampingan lapangan.

Konsep *Community-Based Tourism (CBT)* menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pemerataan fasilitasi, penguatan sumber daya manusia, dan pendampingan lapangan. Oleh karena itu, peran fasilitasi pemerintah perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis yang merata, serta peningkatan akses sumber daya agar pengembangan pariwisata di Kecamatan Una-Una dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan

3. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Una-Una belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari rendahnya intensitas penggerakan masyarakat, keterbatasan kegiatan partisipatif, serta belum terbentuknya dorongan kolektif yang berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata.

Wawancara dengan Kepala Kantor Pariwisata Kecamatan Una-Una menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menjalankan fungsi dinamisator melalui pendekatan motivasional kepada masyarakat. Informan menyampaikan *"Kami sebenarnya ingin terus mendorong masyarakat untuk aktif, terutama dalam mengelola potensi wisata yang ada. Tapi menggerakkan masyarakat itu tidak mudah."* Keterbatasan sumber daya manusia dan jarak antar desa menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Informan juga menyatakan *"Kadang kami ingin turun lebih sering untuk memberi semangat atau bimbingan lapangan, tapi jumlah staf kami terbatas."*

Wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata (*Pokdarwis*) menunjukkan bahwa dorongan pemerintah masih bersifat umum dan belum diikuti dengan tindakan teknis yang berkelanjutan. Informan menyatakan *"Pemerintah sebenarnya cukup sering memberi arahan dan dorongan agar kami tetap aktif. Tapi dorongannya lebih ke semangat saja, bukan dalam bentuk kegiatan yang mendorong kami bergerak lebih jauh."* Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggerakan masyarakat lebih banyak berasal dari inisiatif internal daripada stimulus pemerintah.

Wawancara dengan pengelola *homestay* menunjukkan bahwa fungsi dinamisor belum memberikan dampak signifikan pada sektor akomodasi. Informan menyampaikan *"Pemerintah kadang memberi semangat kepada kami, tapi dorongan itu tidak cukup membuat kami bergerak lebih maju."* Pengelolaan *homestay* masih dilakukan berdasarkan pengalaman tanpa arahan yang terstruktur. Wawancara dengan Kepala Desa Tanimpo menunjukkan bahwa dorongan pemerintah bersifat tidak berkelanjutan. Informan menyatakan *"Kami sering dimotivasi untuk mengembangkan air terjun ini, tapi motivasinya hanya disampaikan sesekali."* Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata masih didominasi oleh inisiatif masyarakat secara mandiri.

Fungsi dinamisor dalam teori Rasyid dalam Labolo (2010) menekankan peran pemerintah dalam menggerakkan, memotivasi, dan membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal di Kecamatan Una-Una. Dorongan pemerintah masih bersifat sporadis dan belum mampu menciptakan gerakan kolektif yang berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah, serta rendahnya intensitas interaksi lapangan menjadi faktor yang memengaruhi lemahnya fungsi dinamisor. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat, *Pokdarwis*, dan pelaku usaha wisata bergerak secara mandiri tanpa dukungan penggerak yang kuat dari pemerintah. Konsep dinamisor dalam pembangunan pariwisata menuntut pemerintah untuk menciptakan energi sosial, memperkuat interaksi antar pelaku, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara kolektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek tersebut belum terpenuhi secara optimal di Kecamatan Una-Una.

Peran pemerintah sebagai dinamisor dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Una-Una belum berjalan secara optimal. Pemerintah telah memberikan dorongan motivasional kepada masyarakat, namun implementasinya masih bersifat tidak berkelanjutan dan belum mampu membentuk gerakan kolektif yang kuat. Dorongan yang diberikan masih terbatas pada komunikasi verbal tanpa tindak lanjut berupa kegiatan partisipatif dan pendampingan rutin. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, jarak geografis, serta rendahnya intensitas interaksi lapangan.

Teori Rasyid dalam Labolo (2010) menegaskan bahwa Peran pemerintah sebagai dinamisor merupakan upaya untuk menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat secara aktif dalam proses pembangunan (Saputra, Irvanji and Marefanda, 2023). Penguatan peran pemerintah melalui pendampingan berkelanjutan

dan kegiatan partisipatif menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan dinamika pengembangan pariwisata di Kecamatan Una-Una.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan pariwisata di Kecamatan Una-Una belum berjalan secara optimal. Regulasi yang tersedia masih bersifat umum dan belum diturunkan ke dalam pedoman teknis yang operasional, sehingga belum dapat menjadi acuan yang jelas bagi pelaku wisata di tingkat desa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat dan pengelola wisata menyusun aturan secara mandiri, sehingga terjadi ketidakseragaman dalam pengelolaan destinasi wisata.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan penelitian (Ragentu, 2025) yang menganalisis pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Saluopa di Kabupaten Poso melalui pendekatan *New Public Management* (NPM). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata telah berjalan cukup baik dalam beberapa aspek, seperti orientasi hasil, efisiensi, manajerialisme, orientasi pelanggan, dan kompetisi. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada efektivitas manajemen, kualitas layanan, serta keterlibatan masyarakat yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan dalam pengelolaan wisata, masih diperlukan penguatan dalam aspek tata kelola agar manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dirasakan secara lebih luas.

Selanjutnya, penelitian (Mashita, Mahfuzat and Abdi, 2024) yang mengkaji *collaborative governance* pada pengelolaan objek wisata Paralayang Wayu di Kabupaten Sigi. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antar aktor belum berjalan optimal akibat keterbatasan komunikasi, rendahnya kepercayaan, dan kurangnya komitmen dalam proses kerja sama. Kondisi tersebut berdampak pada belum efektifnya tata kelola destinasi wisata, meskipun telah mulai dilakukan upaya perbaikan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan peningkatan pemahaman bersama.

Penelitian (Sowa, 2016) lemahnya aspek kolaborasi antar pemangku kepentingan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pula pada aspek regulasi sebagai instrumen dasar dalam tata kelola pemerintahan. Regulasi dalam konteks ini seharusnya berfungsi sebagai pengikat dan pedoman yang memberikan arah yang jelas bagi seluruh aktor yang terlibat, sehingga proses kolaborasi dapat berjalan secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Namun di Kecamatan Una-Una, regulasi belum berfungsi secara efektif karena belum adanya SOP, standar pelayanan, serta aturan pengelolaan retribusi yang jelas.

Perspektif teori pariwisata berkelanjutan oleh (Dangi and Jamal, 2016), Keberlanjutan pariwisata tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup keseimbangan antara dimensi sosial, lingkungan, dan kelembagaan sebagai satu kesatuan sistem yang saling berhubungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Selanjutnya, (Simamora and Sinaga, 2016) menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran sentral sebagai perencana utama dalam menetapkan arah, standar, dan mekanisme pengelolaan destinasi wisata. Dalam konteks pembangunan pariwisata, pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyusun rencana induk, serta menyediakan pedoman teknis yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan pariwisata yang efektif membutuhkan dokumen kebijakan yang terstruktur agar implementasi di lapangan dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan (Sentanu *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa tanpa koordinasi dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan, tata kelola pariwisata menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan karena pengelolaan destinasi wisata merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan sinergi, komunikasi, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiadaan koordinasi yang baik dapat menyebabkan lemahnya integrasi kebijakan, tumpang tindih peran, serta rendahnya efektivitas implementasi program pengembangan pariwisata. Selain itu, rendahnya komitmen antar aktor juga dapat menghambat proses kolaborasi, sehingga tata kelola tidak berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Perspektif *good governance*, khususnya prinsip *rule of law*, kepastian hukum melalui regulasi yang jelas merupakan syarat utama dalam pengelolaan sektor publik. Namun, di Kecamatan Una-Una, ketiadaan regulasi teknis menyebabkan ketidakpastian dalam praktik pengelolaan wisata, terutama pada desa wisata dan *homestay*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal *good governance* dan implementasi di lapangan.

Dengan demikian, baik penelitian ini maupun penelitian (Tsai and Wang, 2017) menunjukkan adanya permasalahan yang serupa dalam pengelolaan pariwisata juga menunjukkan bahwa tata kelola belum berjalan secara optimal, baik dari aspek regulasi maupun kolaborasi antar pemangku kepentingan. Lemahnya regulasi menyebabkan tidak adanya kejelasan pedoman, standar operasional, serta pembagian peran dalam pengelolaan destinasi wisata. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata membutuhkan penguatan baik dari aspek regulasi maupun kolaborasi agar tercipta tata kelola yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Una-Una belum berjalan secara optimal. Temuan ini terlihat dari terbatasnya pelatihan, minimnya pendampingan teknis, serta tidak meratanya pembinaan kepada masyarakat di setiap desa wisata. Kondisi ini menyebabkan pelaku pariwisata seperti Pokdarwis, pengelola *homestay*, dan pemerintah desa masih mengandalkan pengalaman pribadi dalam mengelola destinasi wisata tanpa standar yang jelas.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan penelitian (Nawawi *et al.*, 2025) yang mengkaji strategi *collaborative governance* dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Tojo Una-Una. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas

partisipasi dalam perencanaan pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan keterlibatan masyarakat, keterbatasan teknis, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Meskipun terdapat kekuatan berupa struktur kelembagaan yang baik, transparansi, dan partisipasi yang mulai berkembang, namun pelaksanaannya masih belum optimal akibat adanya kesenjangan kapasitas dan koordinasi.

Penelitian (Nawawi *et al.*, 2025) menyoroti lemahnya efektivitas partisipasi dalam perencanaan pembangunan akibat keterbatasan kapasitas dan koordinasi, maka penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan serupa juga terjadi pada tahap implementasi, khususnya dalam fungsi fasilitasi pemerintah. Dalam konteks ini, keterbatasan fasilitasi menyebabkan terjadinya kesenjangan kapasitas (*capacity gap*) antar pelaku wisata, sehingga pengelolaan destinasi tidak berjalan secara seragam dan berkelanjutan.

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi pemerintah belum bergerak dari sekadar *policy intention* menuju implementasi kebijakan yang operasional. Pemerintah kecamatan sebenarnya memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengembangan kapasitas masyarakat, namun belum didukung oleh instrumen kebijakan, anggaran, serta mekanisme pendampingan yang terstruktur. Hal ini sejalan dengan temuan (Sentanu *et al.*, 2023) yang menegaskan bahwa keterbatasan teknis dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif. Dalam praktiknya, *collaborative governance* membutuhkan dukungan kapasitas teknis, komunikasi yang intensif, serta koordinasi yang terstruktur agar proses kolaborasi dapat berjalan secara optimal..

Berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan tersebut disebabkan oleh faktor anggaran, sumber daya manusia, serta kondisi geografis yang menyulitkan pemerintah dalam menjangkau seluruh desa wisata secara rutin. Akibatnya, fasilitasi yang dilakukan pemerintah lebih banyak berfokus pada kegiatan promosi seperti festival dan *event* pariwisata, sementara aspek peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan teknis masih belum berjalan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara fungsi promosi dan fungsi pemberdayaan dalam pengembangan pariwisata daerah.

Dianalisis lebih lanjut, dominasi fungsi promosi tanpa diimbangi penguatan kapasitas menunjukkan adanya orientasi pembangunan yang masih bersifat *event-based development*, bukan *capacity-based development*. Artinya, keberhasilan pariwisata masih diukur dari banyaknya kegiatan promosi, bukan dari kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola destinasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Perspektif *community-based tourism* (CBT), pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata, yang tidak hanya berfokus pada upaya promosi destinasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, serta penguatan kelembagaan masyarakat seperti kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*) agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengelolaan destinasi (Maritza, Mawar and

Gunato, 2025). Namun, kondisi di Kecamatan Una-Una menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam hal pelatihan manajemen destinasi, pelayanan wisata, dan pengembangan usaha pariwisata berbasis masyarakat.

Selanjutnya, temuan ini juga sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas (*capacity building*) sebagai dasar partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Ketika fasilitasi tidak merata, maka akan terjadi *capacity gap* antar pelaku wisata. Hal ini terlihat dari Pokdarwis dan pengelola *homestay* yang masih bekerja secara mandiri tanpa standar pelayanan dan tanpa dukungan teknis yang konsisten, sehingga inovasi dan kualitas layanan menjadi tidak seragam antar desa.

Teori peran pemerintah sebagai fasilitator, Temuan ini dapat diperkuat dengan penelitian (Alamsyah, Ahsan and Sisrilnardi, 2025) yang mengkaji perencanaan keuangan dalam administrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uetanah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran menghadapi kendala berupa minimnya kolaborasi antara PDAM, pemerintah daerah, dan masyarakat, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, serta adanya pengaruh eksternal yang melemahkan kemandirian pengelolaan. Selain itu, diperlukan penguatan komunikasi, pengawasan, serta prioritas pada kebutuhan masyarakat agar tata kelola dapat berjalan lebih efektif.

Penelitian (Alamsyah, Ahsan and Sisrilnardi, 2025) menyoroti lemahnya kolaborasi, transparansi, dan koordinasi dalam pengelolaan anggaran publik, maka penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan serupa juga terjadi dalam konteks implementasi kebijakan di sektor pariwisata, khususnya pada fungsi fasilitasi pemerintah. Keterbatasan fasilitasi menyebabkan tidak optimalnya koordinasi antar aktor serta tidak meratanya penguatan kapasitas masyarakat, sehingga pengelolaan destinasi wisata berjalan secara tidak seragam.

Dikaitkan dengan teori *good governance*, khususnya prinsip efektivitas dan partisipasi, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek implementasi tata kelola. Partisipasi masyarakat memang ada, tetapi belum didukung oleh kapasitas yang memadai dari pemerintah sebagai pengarah dan fasilitator. Hal ini menyebabkan partisipasi bersifat spontan dan adaptif, bukan partisipasi yang terstruktur dan produktif.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator di Kecamatan Una-Una masih bersifat parsial dan belum sistemik. Fokus yang cenderung berat pada promosi menyebabkan pembangunan kapasitas masyarakat tertinggal, sehingga tujuan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan fasilitasi yang lebih terstruktur melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan lapangan, serta integrasi program lintas sektor agar tercipta *sustainable tourism development* yang berbasis masyarakat.

3. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Una-Una belum berjalan secara optimal. Temuan ini terlihat dari terbatasnya pelatihan, minimnya pendampingan teknis, serta tidak meratanya pembinaan kepada masyarakat di setiap desa wisata. Kondisi ini menyebabkan pelaku pariwisata seperti Pokdarwis, pengelola *homestay*, dan pemerintah desa masih mengandalkan pengalaman pribadi dalam mengelola destinasi wisata tanpa standar yang jelas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amanda, Sasterio and Husain, 2026) yang mengkaji kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida di Desa Enu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek komunikasi dan pembagian peran. Namun demikian, pengelolaan wisata masih menghadapi kendala pada aspek dampak dan adaptasi, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan pengelolaan wisata yang optimal dan berkelanjutan.

Penelitian (Amanda, Sasterio and Husain, 2026) menekankan bahwa kolaborasi sudah berjalan tetapi masih lemah pada aspek dampak dan adaptasi, maka penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan tersebut berakar pada belum optimalnya peran pemerintah sebagai dinamisator, khususnya dalam aspek fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengelolaan destinasi tidak berjalan secara merata dan masih bergantung pada kemampuan masing-masing aktor lokal.

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi pemerintah belum bergerak dari sekadar *policy intention* menuju implementasi kebijakan yang operasional. Pemerintah kecamatan memang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengembangan kapasitas masyarakat, tetapi tidak diikuti oleh dukungan instrumen kebijakan, anggaran, dan mekanisme pelaksanaan yang memadai. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara peran normatif pemerintah sebagai fasilitator dengan praktik nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan tersebut disebabkan oleh faktor anggaran, sumber daya manusia, serta kondisi geografis yang menyulitkan pemerintah dalam menjangkau seluruh desa wisata secara rutin. Akibatnya, fasilitasi yang dilakukan pemerintah lebih banyak berfokus pada kegiatan promosi seperti festival dan *event* pariwisata, sementara aspek peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan teknis masih belum berjalan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara fungsi promosi dan fungsi pemberdayaan dalam pengembangan pariwisata daerah.

Jika dianalisis lebih lanjut, dominasi fungsi promosi tanpa diimbangi penguatan kapasitas menunjukkan adanya orientasi pembangunan yang masih bersifat *event-based development*, bukan *capacity-based development*. Artinya, keberhasilan pariwisata masih diukur dari banyaknya kegiatan promosi, bukan dari kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola destinasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *community-based tourism* (CBT), Pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata, yang tidak hanya berfokus pada promosi destinasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, pemerintah berperan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi kelembagaan seperti kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*) guna meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat lokal. Peran fasilitator ini menjadi penting karena pengembangan pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan peningkatan kapasitas (*capacity building*) agar pengelolaan destinasi dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat (Simamora and Sinaga, 2016). Namun, kondisi di Kecamatan Una-Una menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam hal pelatihan manajemen destinasi, pelayanan wisata, dan pengembangan usaha pariwisata berbasis masyarakat.

Selanjutnya, temuan ini juga sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas (*capacity building*) sebagai dasar partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Ketika fasilitasi tidak merata, maka akan terjadi *capacity gap* antar pelaku wisata. Hal ini terlihat dari Pokdarwis dan pengelola *homestay* yang masih bekerja secara mandiri tanpa standar pelayanan dan tanpa dukungan teknis yang konsisten, sehingga inovasi dan kualitas layanan menjadi tidak seragam antar desa.

Teori peran pemerintah sebagai fasilitator, (Sowa, 2016) menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan (*service provider*), tetapi juga sebagai *enabler* yang berperan dalam memperkuat jejaring antar aktor, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia lokal, serta memastikan bahwa proses kolaborasi berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam peran ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan kolaboratif melalui penguatan institusi, penyediaan regulasi yang mendukung, serta mendorong interaksi antar pemangku kepentingan. Namun, dalam konteks Una-Una, fungsi *enabler* tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan tenaga lapangan, minimnya program berkelanjutan, serta belum adanya sistem pendampingan yang terstruktur.

Dikaitkan dengan teori *good governance*, khususnya prinsip efektivitas dan partisipasi, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek implementasi tata kelola. Partisipasi masyarakat memang ada, tetapi belum didukung oleh kapasitas yang memadai dari pemerintah sebagai pengarah dan fasilitator. Hal ini menyebabkan partisipasi bersifat spontan dan adaptif, bukan partisipasi yang terstruktur dan produktif.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator di Kecamatan Una-Una masih bersifat parsial dan belum sistemik. Fokus yang cenderung berat pada promosi menyebabkan pembangunan kapasitas masyarakat tertinggal, sehingga tujuan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan fasilitasi yang lebih terstruktur melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan lapangan, serta

integrasi program lintas sektor agar tercipta *sustainable tourism development* yang berbasis masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program pengembangan pariwisata, namun efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta kapasitas kelembagaan lokal yang masih perlu diperkuat.

Temuan penelitian ini memperkuat kajian tata kelola pariwisata berkelanjutan yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi praktik pemerintahan daerah dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pengembangan pengelolaan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat agar manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu wilayah penelitian dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tata kelola pariwisata berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nurhannis, M.Si dan Bapak Syamsul Bahri, S.Sos., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Referensi

- Alamsyah, R., Ahsan, S.C. and Sisrilnardi (2025) "Perencanaan Anggaran dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Uetanah di Kabupaten Tojo Una-Una," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 91–106.
- Amanda, M., Sasterio and Husain, S. (2026) "KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI VATU MAPIDA," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 2(1), pp. 132–156.
- Aswita, D. and Andalia, N. (2017) "EKOWISATA BAHARI DI PANTAI TEUPIN LAYEU

- IBOIH DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SERTA PENGEMBANGANNYA," *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(2). Available at: <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.13104>.
- Dangi, T. and Jamal, T. (2016) "An Integrated Approach to 'Sustainable Community-Based Tourism,'" *Sustainability*, 8(5), p. 475. Available at: <https://doi.org/10.3390/su8050475>.
- Díaz, M.R. and Rodríguez, T.F.E. (2016) "Determining the Sustainability Factors and Performance of a Tourism Destination from the Stakeholders' Perspective," *Sustainability*, 8(9), p. 951. Available at: <https://doi.org/10.3390/su8090951>.
- Fadilla, D.N. and Darmawan, F. (2018) "PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PARIWISATA PULAU PRAMUKA KEPULAUAN SERIBU," *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 6(2), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.35814/tourism.v6i2.769>.
- Khotimah, N. (2017) "PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM BERBASIS LINGKUNGAN," *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 6(2). Available at: <https://doi.org/10.21831/gm.v6i2.15416>.
- Maritza, D.F., Mawar, M. and Gunato, D. (2025) "Peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa Dalam Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Sustainable Tourism Di Desa Wisata," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 17(2), pp. 182–190.
- Mashita, P., Mahfuzat and Abdi, fahmi S. (2024) "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PARALAYANG WAYU DI KECAMATAN MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 31–40.
- Matthoriq, M., Zauhar, S. and Hermawan, R. (2021) "Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa 'Bumiaji Agrotourism' di Kota Wisata Batu)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), pp. 20–29. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3>.
- Maturbongs, E.E. (2020) "Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke," *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), pp. 55–63. Available at: <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>.
- Nawawi, M. *et al.* (2025) "COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY IN THE IMPLEMENTATION OF PLANNING AND DEVELOPMENT DELIBERATIONS IN TOJO UNA-UNA REGENCY, INDONESIA," *LEX LOCALIS*, 23.
- Nuridin, N. (2016) "STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PULAU SAMALONA, MAKASSAR," *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2016.v03.i01.p12>.
- Putri, Y.E. and Hardjanto, U.S. (2016) "PELAKSANAAN URUSAN PARIWISATA KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 5(2), pp. 1–10.
- Ragentu, A. (2025) "Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa Di Kabupaten

- Poso," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 321–334.
- Saputra, I.M., Irvanji and Marefanda, N. (2023) "Keuchik Sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator: Sebuah Potret Peran dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat," *Journal of Public Service*, 3(1), pp. 13–16.
- Sentanu, I.G.E.P.S. *et al.* (2023) "Challenges and successes in collaborative tourism governance: A systematic literature review," *European Journal of Tourism Research*, 33, p. 3302. Available at: <https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669>.
- Siagian, S.P. (2003) *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, R.K. and Sinaga, R.S. (2016) "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(1), pp. 79–96.
- Siskawati, E. *et al.* (2020) "Good Governance Implementation in the Development of Sustainable Tourism; The Portrait of Padang City Government," *Akuntansi dan Manajemen*, 15(1), pp. 67–76. Available at: <https://doi.org/10.30630/jam.v15i1.58>.
- Sowa, J.E. (2016) "Considering the Public in Public Management Research," *Journal of Public Administration Research and Theory*, 26(3), pp. 584–588. Available at: <https://doi.org/10.1093/jopart/muv011>.
- Sutarto, J. *et al.* (2018) "MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN KECAKAPAN HIDUP BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DESA WISATA MANDIRI WANUREJO BOROBUDUR MAGELANG," *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35(1), pp. 27–40.
- Tsai, C.-T. (Simon) and Wang, Y.-C. (2017) "Experiential value in branding food tourism," *Journal of Destination Marketing & Management*, 6(1), pp. 56–65. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.02.003>.